

**POTENSI RETRIBUSI KEBERSIHAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DALAM PENDAPATAN
ASLI DAERAH STUDI KASUS DI KOTA
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :
WIDHI ARIESTIANI ROCHDIANINGRUM
NIM. C2B007064

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Widhi Ariestianti Rochdianingrum
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007064
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah
Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi
Kasus di Kota Semarang”**

Dosen Pembimbing : Prof.Dr.H.Miyasto,Su

Semarang, 25 Juni 2010

Dosen Pembimbing,

(Prof.Dr.H.Miyasto,Su)
NIP . 195012251975011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Widhi Ariestianti Rochdianingrum
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007064
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah
Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi
Kasus di Kota Semarang”**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 Juli 2011

Tim Penguji

1. Prof.Dr.H.Miyasto,SU (.....)
2. Johanna Maria K, SE, MEc. Ph. D (.....)
3. Achma Hendra S, SE. MSi. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Widhi Ariestianti Rochdianingrum, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Semarang”adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

(Widhi Ariestianti Rochdianingrum)

NIM : C2B007064

*Hari ini adalah hasil dari kerja keras
hari yang lalu,
dan
Esok adalah hasil kerja keras hari ini*

*Ku persembahkan skripsi ini untuk ;
Orang tua ku (bapak dan ibu; ayah dan mamak),
khususnya ibuku
Terimakasih atas kepercayaan dan kerja kerasnya untuk ku
Buat adek ku.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dalam PAD di kota Semarang. Perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, dengan menggunakan model logit kelompok yaitu melalui perhitungan matematis jumlah rumah di kota Semarang. Kedua, dengan menggunakan pendekatan trend jumlah rumah yang ada di kota Semarang.

Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga melalui pendekatan model logit memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan trend jumlah rumah. Kedua, selama ini potensi retribusi kebersihan sampah di kota Semarang belum digali secara optimal. Besarnya realisasi penerimaan dari retribusi ini selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Penetapan target itu sendiri ternyata masih jauh dari potensinya, baik potensi yang dihitung berdasarkan model logit, maupun model trend.

Kata kunci : Potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga, model logit kelompok, dan trend jumlah rumah

Abstract

This study aims to determine the magnitude of potential retribution of household waste in the PAD in the Semarang city. Calculation of the potential retribution is done by two approaches. The first, by using the logit model through a mathematical calculation the number of houses in the Semarang city. The Second, using the trend approaches the number of existing homes in the Semarang city.

The main findings of this study are as follows. Firstly, the calculation of the potential for cleaning household trash fees through logit model approach provides greater results than the trend approaches the number of homes. Secondly, the potential waste retribution in the city of Semarang has not been explored optimally.

Keywords : The potency of household waste retribution, group logit model and estimate number of house in Semarang city

KATA PENGANTAR

Segala syukur kehadiran Allah S.W.T Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Semarang”. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian, serta memberikan semangat tersendiri kepada penulis selama penulis menuntut ilmu. Penulisan ini penulis haturkan terimakasih kepada :

1. Ibu dan Bapakku terimakasih untuk semuanya. Doakan saya agar selalu bisa menjadi kebanggaan kalian. Buat ibu dan ayah angkat ku, terimakasih buat semuanya.
2. Buat adekku Zhulfiki Arbhi R, Kakak ku Adib Nugroho, Kus Dwiyanoro, Kus Indarto dan Tri Hendry Prasetyo terimakasih buat kenangan masa kecil dan kebersamaan selama ini.
3. Ibu Dra.Hj.Tri Wahyu Rejekiningsih M.Si selaku dosen wali Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2007 atas nasehat dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Prof.Dr.H.Miyasto,Su selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga di sela – sela kesibukannya, serta telah

sabar dan banyak memberikan masukan ilmu kepada penulis selama masa bimbingan dan selama masa kuliah. Terimakasih banyak bapak.

5. Buat Bu Johana dan Bapak Achma terimakasih atas masukan dan ilmunya yang diberikan kepada penulis pada saat sidang.
6. Bapak Drs. Edy Yusuf AG, MSc, Pd. D selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi,
7. Bapak Prof.Drs. H.M.Nasir, Msi, Akt, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi,
8. Segenap dosen – dosen, staff, dan karyawan FE UNDIP pada umumnya dan segenap dosen – dosen , staff dan karyawan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE UNDIP khususnya.
9. Kepada seluruh bapak – bapak dan ibu – ibu yang ada di BLH dan DPPKAD Kab.Gresik, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang serta mas – mas yang ada di BPS Provinsi Jawa Tengah.
10. Buat Mbak Ardiana Primastuti, Mbak Ratih, Mbak Lia, Mbak Alfa, Mas Pri dan Mas Rusli terimakasih buat diskusi dan masukannya selama ini.
11. Buat teman – teman Basecamp (Arie, Rifky, Zaenil, Syamsul, Hendy, Dody, Kurniawan, Agus Riyanto, Adit, Dewi, Ana,Wahyu dan Eno) dan Dirasa Teman (Minawati, Happy, Puput, Devi dan Danti) terimakasih atas cerita dan cintanya selama ini, tanpa kalian saya tidak akan bisa seperti ini. All of you make my world colourful.
12. Buat teman – teman kosan Banjarsari 38 (Wiwik, Amel, Hana, Lia, Dewi, Ifa, Ari, Jenek dan Ami) terimakasih atas hiburannya dikala saya setres.

Teman – teman kosan Peleburan Selatan No 15 (Otit, Ririn, mbak Dewi, Pety, mbak Puri dan mbak Tika dan mas Viki) dan 17082020 terimakasih buat semuanya.

13. Buat teman – teman IESP 07 dan KSPM, terimakasih atas pengalaman dan ceritanya sebagai mahasiswa selama ini, sungguh saya beruntung sekali bisa bertemu dengan kalian semua.
14. Buat Yongseo couple, novel negeri van oranje, novel 5cm, novel sang pemimpi, novel 5 menara, novel rana 3 warna, lagu mimpi by anggung, ku pasti bisa by sheila on 7, long journey ost the dolphin, lembayung bali by saras dewi, dan ost yongseo couple terimakasih telah menemaniku dalam perjalanan menuntut ilmu di kota Semarang.
15. Buat pak Dadang dan mbak Is terimakasih atas supply makanannya selama tiga tahun ini,
16. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sungguh terimakasih banyak untuk semuanya.

Semarang, 25 Juni 2011

Penulis,

(Widhi Ariestianti Rochdianingrum)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRAK</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.2.1 Rumusan Masalah	9
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13

2.1.1 Teori Permintaan	13
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.3 Barang Publik	16
2.1.4 Penentuan Harga Barang Publik	21
2.1.5 Retribusi Daerah	23
2.1.6 Ciri Retribusi Daerah	25
2.1.7 Dasar Pengenaan Tarif Retribusi.....	26
2.1.8 Tarif Retribusi Kebersihan Sampah Berdasarkan Objek Retribusi di Kota Semarang	28
2.1.9 Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan Sampah di Kota Semarang	29
2.1.10 Potensi	30
2.1.11 Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	31
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran	39
2.4 Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	42
3.1.1 Probabilitas Kepemilikan Rumah di 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah	42
3.1.2 Potesi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga di Kota Semarang	44
3.2 Populasi	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	48

3.5 Metode Analisis	49
3.5.1 Analisa Kualitatif	49
3.5.1.1 Perhitungan Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga	49
3.5.1.2 Trend Dengan Metode <i>Ordinary Least Square</i>	50
3.5.2 Analisis Kuantitatif	50
3.5.2.1 Estimasi Model Logit Kelompok	50
3.5.2.2 Pendeteksian Asumsi Klasik	53
3.5.2.2.1 Uji Normalitas	53
3.5.2.2.2 Uji Multikolinearitas.....	54
3.5.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	55
3.5.2.2.4 Uji Autokorelasi	56
3.5.2.3 Uji Signifikansi	56
3.5.2.3.1 Uji F.....	56
3.5.2.3.2 Uji t	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	58
4.1.2 Gambaran Umum Kota Semarang	58
4.1.3 Gambaran Umum Persampahan di Kota Semarang	60
4.2 Deskripsi variabel Penelitian	61
4.2.1 Potensi Retribusi Kebersihan Sampah	61
4.2.2 Probabilitas Kepemilikan Rumah dan Jumlah Rumah Di Kota Semarang	62

4.3 Analisis Data	62
4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	62
4.3.1.1 Uji Normalitas	63
4.3.1.2 Uji Multikolinearitas.....	64
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas	64
4.3.1.4 Uji Autokorelasi	65
4.3.2 Uji Signifikansi.....	65
4.3.2.1 Uji F	66
4.3.2.1 Uji t	66
4.4. Analisis Estimasi Logit Kelompok	67
4.5 Interpretasi Hasil	69
4.5.1 Analisis Probabilitas Kepemilikan Rumah di 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah	69
4.5.2 Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Ditinjau dari Model Logit Kelompok dan Trend Jumlah Rumah di Kota Semarang	70
4.5.2.1 Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga dengan Pendekatan Model Logit Kelompok	70
4.5.2.2 Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Ditinjau dari Trend Jumlah Rumah di Kota Semarang	72
4.5.3 Analisis Potensi, Target, Realisasi dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	75
4.5.4 Analisis Perbandingan Target Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga.....	79
4.5.5 Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang	84
4.5.6 Dampak Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Terpadu 3R bagi	

Masyarakat	86
4.5.7 Pelayanan Publik dan Kebijakan Pelayanan Publik	88
4.5.8 Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga	92
4.5.8.1 Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga	92
4.5.8.2 Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Efisiensi Penerimaan Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga	96
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Keterbatasan	99
5.3 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN – LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Rumah, dan Jumlah Penduduk di Propinsi Jawa Tengah	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kota Semarang	3
Tabel 1.3 Jumlah Rumah di Kota Semarang.....	7
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga dan Jumlah Rumah di Kota Semarang tahun 2005 – 2008	59
Tabel 4.2 Potensi Retribusi Kersihan Sampah Rumah Tangga di Kota Semarang Dengan Menggunakan pendekatan Model Logit Kelompok	71
Tabel 4.3 Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Ditinjau dari Trend Jumlah Rumah di Kota Semarang	73
Tabel 4.4 Realisasi dan Target Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan .	76
Tabel 4.5 Target Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva Permintaan Individu dan Permintaan Kelompok	14
Gambar 2.2 Diagram Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal Menurut Pigou	17
Gambar 2.3.1 Diagram Kerangka Pemikiran Penelitian	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Tabel 4.1 Tabel Hasil Kolmogorov Smirnov Test untuk Menguji Normalitas.....	106
Lampiran Tabel 4.2 Koefisien Hasil Uji Hipotesis Pengaruh JP, SKNBPR, VIF, dan t_{hitung}	107
Lampiran Tabel 4.3 Tabel Out Put Uji Glejster Untuk Mengidentifikasi Penyakit Heteroskedastisitas	107
Lampiran Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Run Tes untuk Menguji Keberadaan Autokorelasi	108
Lampiran Tabel 4.5 Tabel F hitung	109
Lampiran Tabel 4.6 Besarnya Nilai R^2	109
Lampiran Tabel 4.7 Perhitungan Probabilitas Kepemilikan Rumah di 33 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.....	110
Lampiran Tabel 4.8 Perhitungan Proyeksi Jumlah Rumah Tangga di Kota Semarang	114
Lampiran Tabel 4.9 Perhitungan Proyeksi Jumlah Rumah di Kota Semarang.....	115
Lampiran Tabel 4.10 Perhitungan Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dengan Menggunakan Model Logit Kelompok.....	116
Lampiran Tabel 4.11 Perhitungan Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga dengan Menggunakan Pendekatan Trend Jumlah Rumah	117
Lampiran Tabel 4.12 Target dan Realisasi Penerimaan	117
Lampiran Tabel 4.13 Data Jumlah Rumah, Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, dan SKNBPR di 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007	118
Lampiran Tabel 4.14 Data Jumlah Rumah, dan Jumlah Rumah Tangga di Kota Semarang Tahun 1995 – 2008	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup baik, salah satunya adalah sektor properti. Sektor properti yang cukup berkembang adalah perumahan. Berkembangnya sektor perumahan ini dikarenakan banyaknya permintaan rumah oleh masyarakat, dimana permintaan rumah ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, dan besarnya suku bunga kredit. Menurut penelitian Edhi Mulyani, n.d dalam penelitiannya di kabupaten Bekasi menyatakan bahwa yang mempengaruhi permintaan rumah di kabupaten Bekasi adalah jumlah tenaga kerja industri, harga rumah, dan besarnya suku bunga kredit. Semakin meningkatnya permintaan rumah ini, secara langsung menyebabkan semakin bertambahnya jumlah rumah yang ada, apalagi pada saat ini fasilitas kredit rumah bersubsidi cukup mudah untuk didapatkan. Di provinsi Jawa Tengah sendiri penyediaan kredit rumah KPR bersubsidi dilakukan bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Syarat untuk mendapatkan kredit rumah bersubsidi cukup mudah, yaitu hanya mempunyai gaji maksimal Rp 2.500.000,- per bulan dan yang terpenting sudah menjadi pegawai tetap. Lama jangka waktu kredit yaitu 20 tahun serta besarnya suku bunga KPR tetap. Adanya kemudahan kredit rumah ini, juga merupakan

salah satu penyebab semakin banyaknya permintaan rumah oleh masyarakat seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada.

Berikut Tabel 1.1 merupakan tabel tentang jumlah penduduk dan jumlah rumah yang ada di provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1
Jumlah Rumah dan Jumlah Penduduk di Provinsi
Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2005	7.221.212	32.908.850
2	2006	7.260.846	32.177.730
3	2007	7.327.166	32.380.279
4	2008	7.502.625	32.626.390

Sumber : BPS Jawa Tengah, Jateng dalam angka tahun 2005-2008

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 sampai 2006 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 731.120 jiwa namun hal tersebut tidak diikuti dengan penurunan jumlah rumah. Salah satu penyebab penurunan jumlah penduduk adalah adanya bencana gempa bumi di kabupaten Klaten dan kabupaten Cilacap. Pada tahun 2005 jumlah rumah sebesar 7.221.212 unit dan pada tahun 2006 jumlah rumah sebesar 7.260.846 unit, pada tahun 2005 sampai 2006 di provinsi Jawa Tengah jumlah rumah mengalami peningkatan sebesar 39.634 unit. Pada tahun 2006 sampai 2008, jumlah penduduk di provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang diiringi dengan peningkatan jumlah rumah.

Adanya peningkatan jumlah rumah di provinsi Jawa Tengah secara umum setiap tahunnya, merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi pemerintah kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah untuk menggali potensi retribusi daerah, salah satunya yaitu retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Hal ini dikarenakan ketika jumlah penduduk naik maka permintaan rumah naik. Semakin banyaknya jumlah rumah yang ada merupakan suatu peluang dalam pengenaan tarif retribusi kebersihan sampah rumah tangga.

Studi kasus potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dalam penelitian ini dilaksanakan di kota Semarang. Hal ini dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masrofi (2004) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa retribusi kebersihan sampah di kota Semarang mempunyai koefisien potensi sebesar 2,21 yang berarti retribusi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Pernyataan Masrofi juga dapat didukung dengan besarnya realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan yang selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut Tabel target dan realisasi retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di kota Semarang.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di kota Semarang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Kenaikan Target
2007	5.588.510.000	5.598.282.500	100,17 %	2,07 %
2008	5.704.462.080	5.771.802.925	101,18%	1,99 %
2009	5.818.551.000	5.866.744.012	100,83%	2,68 %
2010	5.974.832.700	6.145.140.950	102,85%	12,5 %
2011	6.721.686.788	2.240.562.262*		

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

* Realisasi sampai bulan april

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan dari tahun 2007 sampai 2010 selalu mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan meskipun besarnya target penerimaan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Rata – rata besarnya persentase realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebesar 101,5% setiap tahunnya. Besarnya nilai realisasi penerimaan yang melebihi target merupakan suatu indikasi bahwa sebenarnya ada potensi yang belum digali secara optimal dalam retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dan besarnya target yang ditetapkan terlalu kecil dan dalam menetapkan target kurang memperhatikan potensi yang ada. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui rata – rata kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan pada tahun 2007 sampai 2009 sangat kecil yaitu 2,24%, namun pada tahun 2011 kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2007 sampai 2009 yaitu 12,5%. Rata – rata besarnya target retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebesar Rp 5.961.608.514 setiap tahunnya.

Pengoptimalan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota Semarang merupakan suatu yang penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nick Devas (1989) (dalam Wisnu Ardianto ; 2006) bahwa :

Untuk daerah kota, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, karena hasil retribusi hampir mencapai sebagian dari keseluruhan pendapatan asli daerah sendiri.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan

UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pada era otonomi daerah ini pemerintah daerah berusaha untuk mengatur roda pemerintahannya sendiri yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah juga dituntut untuk mencari sumber dana secara mandiri dengan cara menggali potensi daerah yang dimiliki. Besarnya potensi yang dimiliki merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan biaya pembangunan daerah, walaupun ada dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan. Berdasarkan pasal 6 UU No 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat, peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan (i) pajak daerah (ii) retribusi daerah (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain – lain PAD yang sah. Menurut Wisnu Ardianto (2006) *“Besarnya proporsi PAD suatu daerah harus melebihi subsidi dari pemerintah pusat, hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas otonominya”*. Adanya pembayaran retribusi daerah bukan semata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah saja, juga untuk hal – hal yang lain seperti

pembangunan daerah. Ketika penerimaan retribusi daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah juga semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik.

Di kota Semarang retribusi kebersihan sampah merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas / rekening Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah.

Pada tahun 2010, besarnya realisasi pendapatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang Rp 6.431.200.950 dan besarnya biaya belanja langsung dan belanja tak langsung sebesar Rp 49.124.543.700 sehingga pada tahun 2010 biaya untuk belanja minus Rp 42.693.342.750. Pada tahun 2010 diketahui besarnya biaya belanja yang dikeluarkan lebih besar dari pada besarnya pendapatan yang didapatkan. Pada tahun 2010, besarnya realisasi penerimaan dari retribusi kebersihan sampah rumah tangga dari pelanggan PDAM aktif membayar (131.391 rumah) sebesar Rp 379.855.000 sedangkan pelanggan pasif (21.330 rumah) dengan besar potensi penerimaan Rp 68.111.000. Dari 177 kelurahan hanya 93 kelurahan yang membayar retribusi kebersihan sampah rumah tangga dan besarnya penerimaan sebesar Rp 15.727.000. Sehingga total penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga sebesar Rp 395.582.000 pada tahun 2010.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa besarnya realisasi selalu melebihi target, dan hal tersebut mengindikasikan adanya potensi yang belum tergali dan dalam menetapkan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan nilainya terlalu kecil serta kurang memperhatikan potensi yang ada. Walaupun besarnya realisasi melebihi target, namun berdasarkan pemaparan pada paragraf sebelumnya dapat diketahui bahwa besarnya biaya operasional lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang didapatkan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan menggali potensi retribusi pelayanan persampahan / kebersihan yang ada. Salah satu dasar objek retribusi pelayanan persampahan / kebersihan yang dapat digali potensinya sebagai sumber penerimaan yaitu retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Hal ini dikarenakan jumlah rumah di kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut Tabel jumlah rumah di kota Semarang,

Tabel 1.3
Jumlah Rumah di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Rumah (unit)
2005	312.431
2006	314.322
2007	317.710
2008	412.907

Sumber : Jateng dalam angka tahun 2005 – 2008;
BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa di kota Semarang jumlah rumah pada tahun 2005 – 2008 selalu mengalami peningkatan. Dari tahun 2005 – 2008 besarnya peningkatan rumah sebesar 100.476 unit rumah. Adanya

peningkatan jumlah rumah merupakan suatu potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga yang dapat digali secara optimal sebagai salah satu sumber penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan. Adanya peningkatan jumlah rumah setiap tahunnya secara langsung menyebabkan semakin bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan, dan hal tersebut merupakan potensi penerimaan yang cukup besar jika dikembangkan dan dikelola dengan baik. Pada tahun 2010 besarnya penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga sebesar Rp 395.582.000. Pada tahun 2010 besarnya proporsi retribusi kebersihan sampah rumah tangga terhadap penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebesar 6,43%.

Adanya peningkatan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga maka pendapatan yang diterima oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan semakin meningkat dan pendapatan asli daerah kota Semarang juga mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya pendapatan daerah seiring dengan meningkatnya penerimaan retribusi daerah diharapkan dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah semakin meningkat. Dengan adanya tambahan dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah diharapkan kualitas pelayanan kebersihan sampah yang diberikan akan semakin baik sehingga lingkungan kota Semarang akan menjadi lebih bersih dan sehat. Bukan hanya itu saja, adanya peningkatan pendapatan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai guna dan manfaat dari sampah yang dihasilkan. Sehingga dalam jangka waktu tertentu jumlah sampah yang dihasilkan dapat direduksi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat begitu penting dan besar potensi retribusi daerah dalam hal ini retribusi kebersihan sampah terhadap pendapatan asli daerah. Selain pada PAD retribusi kebersihan sampah ini juga mempunyai dampak yang besar pada lingkungan di kota Semarang, maka dalam penelitian ini diambil sebuah judul penelitian “ **Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Semarang**”

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas dapat diketahui bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan melalui penggalan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar potensi dan proyeksi potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dalam pendapatan asli daerah kota Semarang dan besar potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga sampai tahun 2013?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga di kota Semarang?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga di kota Semarang dilakukan pada tahun 2005 – 2008 hal ini

dikerenakan data jumlah rumah yang tersedia hanya dari tahun 2005 – 2008. Untuk tahun 2009 – 2013 data jumlah rumah didapatkan dari melalui proyeksi trend dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* dan model logit kelompok. Oleh karena itu pada tahun 2009 – 2013 dilakukan perhitungan proyeksi potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga di kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghitung dan memproyeksikan besar potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga terhadap pendapatan asli daerah kota Semarang.
2. Merekomendasikan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber penerimaan bagi retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan rekomendasi kepada dinas terkait yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Menguraikan alasan retribusi kebersihan sampah rumah tangga menjadi retribusi yang potensial untuk dikembangkan, menunjukkan rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian adalah untuk menghitung potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyediaan barang publik; penentuan harga barang publik; retribusi daerah; ciri retribusi daerah; dasar pengenaan tarif retribusi; tarif retribusi kebersihan sampah berdasarkan objek retribusi di kota Semarang; sistem pemungutan retribusi kebersihan sampah di kota Semarang; potensi; dan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian. Hipotesis digunakan untuk menduga keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam model penelitian ini. Penelitian terdahulu yang ada didalam penelitian ini berfungsi sebagai referensi utama dan referensi pendamping.

BAB III Metode Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan adalah probabilitas kepemilikan rumah di 33 kabupaten / kota yang ada di provinsi Jawa Tengah; potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga di kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section*, dimana data ini didapatkan BPS Jawa Tengah;

Perpustakaan Bank Indonesia, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini *pertama*, metode analisis kualitatif yang dilakukan untuk menghitung potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga; menghitung proyeksi jumlah rumah dan jumlah rumah tangga dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square*. *Kedua*, metode analisis kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah estimasi model logit kelompok.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa perhitungan potensi dan proyeksi retribusi kebersihan sampah rumah tangga yang ada di kota Semarang. Perhitungan potensi dan proyeksi retribusi kebersihan sampah rumah tangga ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan model logit kelompok dan trend jumlah rumah melalui metode *Ordinary Least square*.

BAB IV Penutup

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan intisari yang didapatkan dari hasil penelitian. Saran yang diusulkan dalam penelitian ini ditujukan untuk instansi terkait dan untuk penelitian selanjutnya. Dimana penyampaian saran ini berdasarkan hasil yang diperoleh selama penelitian dan disertai dengan lampiran data yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bab II ini akan dipaparkan tinjauan pustaka, dimana tinjauan pustaka ini digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah teori permintaan rumah yang digunakan sebagai teori dasar dalam menganalisis permintaan rumah; pendapatan asli daerah yang merupakan dasar teori yang menjelaskan darimana saja sumber pendapatan asli daerah; teori penyediaan barang publik yang digunakan sebagai landasan teori dalam penyediaan barang publik; penentuan harga barang publik; retribusi daerah; ciri retribusi daerah; dasar pengenaan tarif retribusi; tarif retribusi kebersihan sampah berdasarkan objek retribusi di kota Semarang; sistem pemungutan retribusi kebersihan sampah di kota Semarang; potensi yang digunakan sebagai landasan teori dalam perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang digunakan sebagai dasar teori dalam penggalian potensi yang ada. Berikut uraian mengenai landasan teori yang digunakan ;

2.1.1 Teori Permintaan

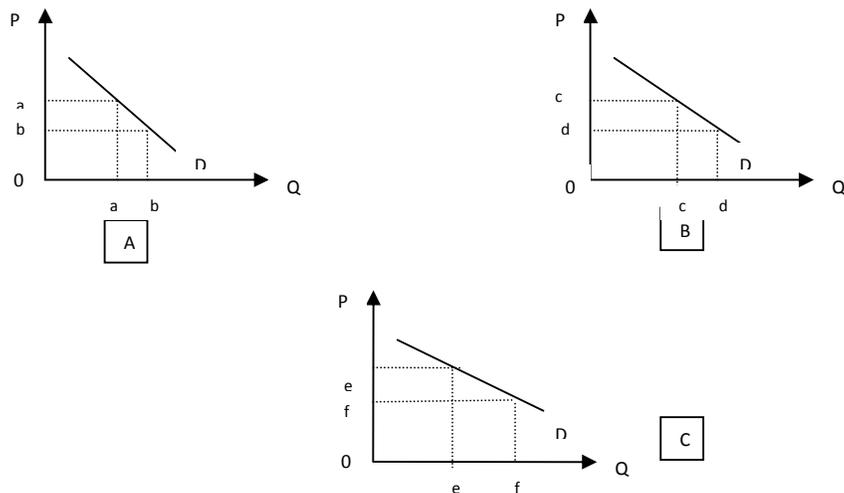
Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh masyarakat pada berbagai tingkat harga. Menurut Sadorno Sukirno (1985:52)

hukum permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga dari suatu barang, maka permintaan barang tersebut semakin banyak; sebaliknya semakin tinggi harga sesuatu barang, maka semakin sedikit permintaan barang tersebut.

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan secara umum adalah (i) harga barang itu sendiri (ii) harga barang lain yang mempunyai keterkaitan erat dengan barang tersebut (iii) pendapatan rumah tangga dan (iv) corak distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Besarnya permintaan suatu individu dapat digambarkan dalam kurva permintaan individu. Kurva permintaan individu adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara besarnya tingkat harga dan jumlah barang yang diminta oleh suatu individu. Gabungan dari kurva permintaan individu ini merupakan kurva permintaan pasar. Adapun kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar dapat digambarkan pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kurva Permintaan Individu dan Permintaan Pasar



Sumber Gambar : Sadorno Sukirno (56: 186)

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa A adalah kurva permintaan individu A dan B adalah kurva permintaan individu B. Masing-masing individu mempunyai permintaan akan suatu barang yang berbeda pada suatu tingkat harga. Adanya perbedaan permintaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan salah satunya adalah pendapatan individu tersebut. Kurva C adalah kurva permintaan pasar. Pada kurva C ini digambarkan gabungan antara permintaan individu A dan permintaan individu B.

Pada analisis ekonomi, perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan harga penting untuk diketahui. Dengan mengetahui besarnya elastisitas, dapat diramalkan perubahan yang terjadi di pasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan (i) banyaknya barang-barang pengganti yang tersedia (ii) besarnya persentasi pendapatan yang digunakan dan (iii) jangka waktu analisis (SadornoSukirno,185:80).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Berdasarkan pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah,

2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain – lain PAD yang sah,

Lain – lain PAD yang sah yang dimaksud adalah :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan.

Menurut Halim dan Nasir (2006: 44) (dalam Amri Siregar ; 2001: 35)

bahwa :

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2.1.3 Barang Publik

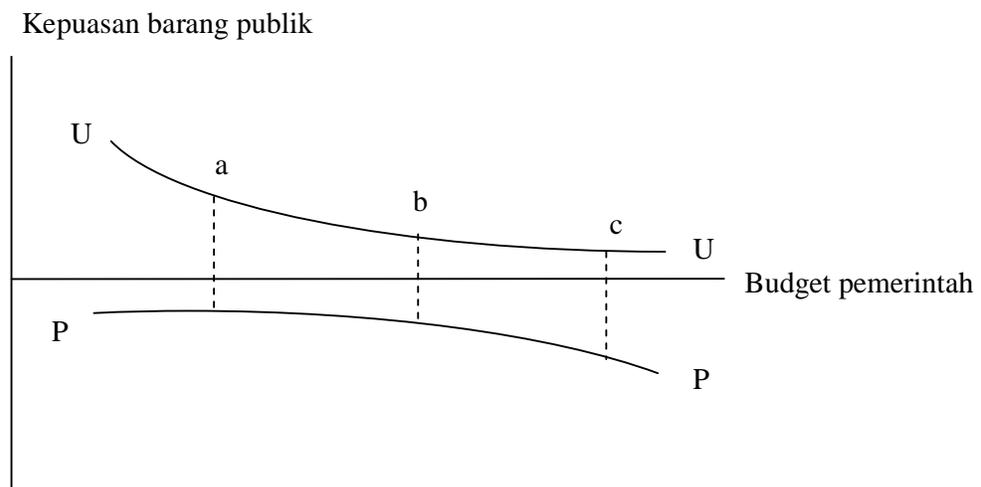
Pengertian barang publik murni yaitu beberapa jenis barang yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak ada orang yang tidak ingin menghasilkannya atau kemungkinan dihasilkan oleh pihak swasta tetapi dalam jumlah yang terbatas. Barang publik murni ini mempunyai karakteristik yaitu (i) *non rivalry*, penggunaannya tidak bersaing yang berarti semua orang dapat menggunakan barang tersebut dan (ii) *non excludability* , tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Barang publik ini merupakan barang yang disediakan oleh

pemerintah dan merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya (Guritno:57). Adapun penyediaan barang publik dapat dijelaskan oleh beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori Pigou

Pada teori ini, Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program – program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.

Gambar 2.2
Diagram Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal Menurut Pigou



Sumber ; Guritno Mangkoesoebroto (1993;66)

Pada Gambar 2.1 kurva UU menunjukkan kepuasan akan barang publik. Pada kurva UU dapat dilihat bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan maka akan semakin menurun kepuasan masyarakat akan barang publik tersebut. Kurva PP menunjukkan ketidakpuasan marjinal. Pada titik *a* dapat ditunjukkan tingginya kepuasan marginal masyarakat akan barang publik lebih besar dari pada ketidakpuasan masyarakat akan membayar pajak. Pada titik *b* dapat diketahui bahwa kepuasan marginal masyarakat akan barang publik sama dengan ketidakpuasan masyarakat akan pembayaran pajak. Titik *b* ini merupakan keadaan yang optimum dimana kepuasan marginal barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak. Pada titik *c* merupakan suatu titik yang menunjukkan bahwa kepuasan marjinal masyarakat akan barang publik lebih kecil dibandingkan dengan ketidakpuasan masyarakat akan pembayaran barang publik. Kelemahan dari teori ini yaitu, teori ini didasarkan pada rasa ketidakpuasan marjinal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marjinal pada barang publik, padahal kepuasan dan ketidakpuasan merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

2. Teori Bowen

Teori Bowen didasarkan pada teori harga seperti penentuan harga pada barang swasta. Barang swasta adalah barang yang mempunyai prinsip pengecualian, yaitu pemilik suatu barang dapat mengecualikan orang lain dari

manfaat barang tersebut. Jadi pada barang swasta setiap individu menghadapi harga barang yang sama. Menurut Bowen barang publik adalah barang yang tidak ada prinsip pengecualian, dimana jika barang publik telah disediakan, maka semua orang dapat menikmati manfaat akan barang tersebut. Jadi menurut Bowen perbedaan barang publik dan barang swasta adalah (i) pada barang swasta, harga yang dihadapi oleh setiap individu akan suatu barang adalah sama dan jumlah barang yang diminta merupakan penjumlahan dari permintaan setiap individu. Pada barang publik, harga dari barang publik merupakan penjumlahan dari sejumlah harga yang rela dikorbankan oleh setiap individu untuk mendapatkan barang publik tersebut sedangkan pada barang publik jumlah barang yang dikonsumsi antar individu adalah sama. Adapun kelemahan dari teori ini adalah mendasarkan pada permintaan dan penawaran, padahal untuk barang publik para konsumen tidak dapat mengemukakan preferensi akan barang yang diinginkan sehingga kurva permintaan menjadi tidak ada.

3. Teori Erick Lindahl

Teori Erick Lindahl ini di dasarkan pada analisis kurva indiferens dengan anggaran tetap yang terbatas. Kurva indiferens mempunyai bentuk melengkung ke atas yang didasarkan pada asumsi bahwa semua individu suka pada barang publik, tetapi kurang suka untuk membayar penyediaan barang publik. Guna mendapatkan kurva permintaan individu akan barang publik dapat dilakukan dengan menentukan kepuasan maksimum setiap individu pada setiap proporsi biaya. Menurut Lindahl, titik keseimbangan yang optimal dalam penyediaan

barang publik adalah dimana ketika biaya yang dikeluarkan sama dengan pembayaran yang diterima dari setiap masing – masing individu. Teori Erik Lindahl merupakan teori yang sangat berguna untuk membahas penyediaan barang publik yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antar anggota masyarakat.

Kelemahan dari teori Lindahl adalah teori ini hanya membahas mengenai penyediaan barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Sehingga pada teori ini hanya dilihat penyediaan barang publik tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan yang optimal.

4. Teori Anggaran

Pada teori ini, diterangkan bahwa penyediaan barang – barang publik melalui anggaran. Teori anggaran didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar penggunaan barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang – barang swasta. Teori ini merupakan teori yang analisa penyediaan barang publik sesuai dengan kenyataan, hal ini dikarenakan bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu – individu dalam masyarakat dan teori ini juga dapat digunakan untuk menentukan beban pajak diantara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Adapun kelemahan teori ini adalah digunakannya kurva indifferens sebagai alat analisis, dimana alat ini kurang bermanfaat untuk diaplikasikan penggunaannya dalam kenyataan sehari – hari.

Pada dasarnya semua analisis dalam teori yang telah dijelaskan diatas menggunakan kurva permintaan atau kurva indiferens yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan pengukuran secara empiris. Oleh karena itu teori ekonomi dianggap tidak mampu dalam memecahkan masalah alokasi sumber – sumber ekonomi untuk menghasilkan barang publik dan swasta secara empiris, sehingga dalam pemecahannya dapat dilakukan dengan proses politik yaitu melalui voting, namun voting juga tidak dapat memberikan pemecahan masalah dengan tepat kecuali masyarakat memiliki suatu preferensi yang identik sehingga dapat dicapai suatu hasil secara aklamasi.

Aklamasi merupakan suatu pemungutan suara dimana 100 persen orang setuju diadakannya suatu proyek merupakan cara yang paling baik. Aklamasi ini dapat melindungi golongan minoritas dalam suatu masyarakat. Dengan aklamasi kepentingan suatu minoritas juga akan terjamin, namun cara aklamasi ini sangat sulit untuk dapat mencapai suatu keputusan, terutama jika jumlah pemungut suara dalam jumlah yang besar sekali.

2.1.4 Penentuan Harga Barang Publik

Barang publik adalah barang yang disediakan oleh pemerintah dengan dibiayai oleh anggaran belanja pemerintah tanpa melihat siapa yang melakukan. Namun, tidak semua barang publik merupakan barang publik murni. Besarnya penetapan barang publik biasanya dikenakan dalam bentuk pajak. Sedangkan retribusi dikenakan karena adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun, ada beberapa jenis barang publik yang penetapan

harganya dapat dilakukan dengan mekanisme pasar. Hal ini dikarenakan adanya prinsip pengecualian dapat dilaksanakan tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan dalam praktek. Barang tersebut dinamakan barang campuran, dimana barang tersebut merupakan barang swasta yang menimbulkan eksternalitas dan dibiayai dari hasil penjualan atau dibiayai dengan APBN. Contoh dari barang ini adalah rumah sakit, transportasi umum, pemancar TV. Pelayanan retribusi kebersihan sampah dapat juga dimasukkan dalam jenis barang campuran (*quasi privat*), hal ini dikarenakan sampah merupakan barang yang dihasilkan oleh masyarakat ataupun swasta namun memiliki dampak eksternalitas, serta biaya pengelolaan sampah itu sendiri didapatkan dari penarikan retribusi atas pelayanan kebersihan sampah tersebut dan sebagian dari dana APBD.

Pemakaian barang publik yang dilakukan oleh masyarakat tidak merata pada setiap waktunya. Pada waktu tertentu masyarakat merasa perlu menggunakan barang publik, namun adakalanya pada waktu tertentu masyarakat merasa kurang perlu menggunakan barang publik. Pada situasi seperti ini penetapan harga berdasarkan peak-load harus diterapkan oleh pemerintah. Apabila pemerintah mengenakan tarif pada saat peak, maka masyarakat yang tidak terlalu membutuhkan barang publik pada saat itu, akan mengurangi konsumsi barang publiknya pada saat itu, dan menggantinya dengan konsumsi barang publik pada saat off-peak.

Adanya Pengeanaan pajak pada barang publik yang kurang optimum penggunaannya merupakan suatu tindakan yang kurang tepat. Namun seandainya pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan barang

tersebut, hendaknya besar biaya pemungutan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika pemakaian barang umum tersebut bersifat rival, yang berarti apabila seseorang melakukan pemakaian atas barang tersebut akan menimbulkan berkurangnya kepuasan orang lain dalam memakai barang tersebut, maka harus dikenakan pajak atas biaya marjinal yang diderita oleh semua pemakai barang publik tersebut.

2.1.5. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum menurut Putranto (2007 : 14) adalah :

Pembayaran – pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa–jasa negara atau dapat dikatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut. Sedangkan menurut Dr.Guritno Mangkoesobroto, M.Ec (1993:181) retribusi adalah “*pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah*”.

Retribusi daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah oleh kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, golongan retribusi daerah ada tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha dan retribusi perijinan. Menurut UU No 28 Tahun 2009 objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan secara umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Pengertian retribusi jasa umum adalah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada pribadi atau badan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kriteria retribusi jasa umum menurut Mariot P. Siahaan (2005 : 438) berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a adalah :

- a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu,
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi,
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemafaatan umum,
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi,
- e) Penyelenggaraan retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional,
- f) Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial,
- g) Adanya pemungutan retribusi memberikan perbaikan pada kualitas pelayanan yang lebih baik,

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan,
- b. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan,
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil,
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
- f. Retribusi pelayanan pasar,
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
- j. Retribusi penyediaan dan / penyedotan kaskus,
- k. Retribusi pengolahan limbah cair,
- l. Retribusi pelayanan tera / tetra ulang,
- m. Retribusi pelayanan pendidikan,
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi,

2.1.6 Ciri Retribusi Daerah

Menurut R.Soedargo;1984 (dalam Diahayu,2009:18) retribusi daerah mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- a) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan dan memanfaatkan jasa ataupun barang yang disediakan oleh pemerintah,

- b) Adanya balas jasa secara langsung yang dikenakan oleh pengguna jasa atas barang pemerintah,
- c) Berlakunya asas pengecualian bagi yang tidak memanfaatkan jasa atau barang pemerintah maka tidak dikenakan pungutan,
- d) Retribusi daerah dipungut berdasarkan undang – undang atau peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat,
- e) Bagi pengguna jasa atau barang jika diketahui tidak membayar dapat dikenai hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan peraturan daerah,

2.1.7 Dasar Pengenaan Tarif Retribusi

- a) UU No 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pada Undang- Undang No 34 Tahun 2000 dijelaskan bahwa prinsip dan sasaran menentukan tarif ditentukan sebagai berikut:
 1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
 2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- b) Undang – undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1. Pada retribusi jasa umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas dan pengendalian atas pelayanan tersebut. Penetapan tarif retribusi ini hanya untuk mengganti sebagian biaya.
 2. Pada retribusi jasa usaha, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
 3. Pada retribusi perizinan tertentu, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ini, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- c) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

2.1.8 Tarif Retribusi Kebersihan Sampah Berdasarkan Objek Retribusi di Kota Semarang

1. Besarnya tarif retribusi kebersihan sampah di kota Semarang sebagai berikut :

1) Persil bukan niaga :

a. Persil bersifat rumah tangga yang terletak di jalan kelas I dan II :

Rp 5.000 / bulan,

b. Persil bersifat rumah tangga yang terletak di jalan kelas III dan IV :

Rp 3.000 / bulan,

c. Persil bersifat rumah tangga yang terletak di jalan kelas V :

Rp 1.000 / bulan,

2) Persil bersifat niaga ;

a. Persil bersifat niaga yang terletak di jalan kelas I dan II : Rp 6.000 / M³

b. Persil bersifat niaga yang terletak di jalan kelas III, IV, dan V :

Rp 4.000 / M³

3) Lingkungan pasar :

a. Kios /vak Rp 150 / hari

b. Los / dasaran terbuka Rp 100 /hari

4) Badan sosial / tempat ibadah : Rp 1.000 / hari

Keterangan :

- Jalan kelas I adalah jalan dengan lebar 10 meter keatas

- Jalan kelas II adalah jalan dengan lebar jalan 8 meter sampai kurang dari 10 meter
 - Jalan kelas III adalah jalan dengan lebar jalan 6 meter sampai kurang dari 8 meter
 - Jalan kelas IV adalah jalan dengan lebar jalan 4 meter sampai kurang dari 6 meter
 - Jalan kelas V adalah jalan dengan lebar kurang dari 4 meter
2. Bagi yang membuang sampah langsung ke TPA (tempat pembuangan sampah akhir) dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 2.500/M³ .

2.1.9 Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan Sampah di Kota Semarang

Pemungutan retribusi kebersihan sampah dilakukan pada tiap – tiap bulan, setiap minggu dan atau setiap hari oleh petugas yang ditunjuk oleh walikota sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kebersihan untuk melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan baik secara langsung maupun melakukan kerja sama dengan dinas / instansi lain, perusda, badan usaha swasta yang ditunjuk,
2. Perusahaan air minum daerah (PDAM) memungut retribusi kebersihan untuk rumah tangga maupun niaga yang berlangganan air minum pada perusahaan daerah air minum kota Semarang,
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar memungut retribusi kebersihan sampah dilingkungan pasar di wilayah kota Semarang,

4. Pemerintah kelurahan / lembaga masyarakat tingkat kelurahan dibawah koordinasi camat memungut retribusi kebersihan objek rumah tangga yang tidak berlangganan PDAM, niaga (pertokoan, pabrik, hotel dan lain – lain) dan objek lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang,

2.1.10 Potensi

Menurut Sunarto (dalam Dika Ristrama ; 24:2009) potensi adalah :

Daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.

Potensi penerimaan daerah dapat diukur dengan dua pendekatan. *Pertama*, berdasarkan fungsi penerimaan, *kedua* berdasarkan indikator sosial ekonomi.

Guna mengetahui potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga terhadap PAD perlu dikaji terlebih dahulu komponen yang membentuk potensi retribusi kebersihan sampah itu sendiri. Komponen – komponen yang mempengaruhi retribusi kebersihan sampah yaitu tarif retribusi kebersihan sampah, dan jumlah rumah.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi kebersihan sampah adalah (i) kurangnya personil, peralatan dan perlengkapan dalam pelayanan kebersihan sampah sehingga pelayanan kurang optimal, (ii) kurangnya data yang sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga perhitungan potensi yang optimal belum bisa dilakukan dengan baik, (iii)

kurangnya kemauan masyarakat dalam pembayaran retribusi hal ini dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan kebersihan sampah serta kurang peduli terhadap kebersihan.

2.1.11 Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Liana Dwi Puspita (dalam Hadriyan Putra,2010:37) pada jangka pendek usaha peningkatan pendapatan dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan cara :

a) Memperluas basis penerimaan,

Mengidentifikasi pembayaran pajak atau retribusi baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak atau retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b) Memperkuat proses pemungutan,

Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah mempercepat penyusunan perda, melakukan perubahan tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c) Meningkatkan pengawasan,

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara diadakannya pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan pelayanan yang diberikan daerah.

- d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik,

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antar dinas terkait.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi utama dalam penelitian ini *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Masrofi yang berjudul “ Potensi dan Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah”. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa salah satu retribusi yang potensial untuk dikembangkan di kota Semarang adalah retribusi kebersihan sampah dan variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah PDRB dan jumlah penduduk. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Edhi Mulyadi yang berjudul “ Pengaruh Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap Permintaan Perumahan Sederhana dan Sangat Sederhana di kab.Bekasi. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi permintaan rumah adalah jumlah tenaga kerja industri, harga rata – rata RS dan RSS serta suku bunga kredit.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penelitian pendukung pada penelitian utama adalah *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh

Agung Riyadi, Anton Agus Setiyawan dan Didit Purnomo dengan judul “ Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kab.Sukoharjo”. Pada penelitian tersebut didapatkan bahwa pada dasarnya pajak dan retribusi di kab.Sukoharjo mempunyai potensi untuk dikembangkan. Adapun pajak dan retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan diantaranya retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dan pajak pendapatan ABT. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Andika Budi Ratwono dengan penelitian yang berjudul “ Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta”. Adapun hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi penerimaan retribusi adalah jumlah penertiban akta catatan sipil; tingkat inflasi; jumlah rumah sakit dan puskesmas; jumlah pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan bermotor.

Pada penelitian ini, dalam analisis permintaan rumah variabel yang digunakan berdasarkan penelitian Edhi Mulyadi. Jika pada penelitian Edhi Mulyadi variabel independen tersebut digunakan sebagai indikator dalam permintaan rumah, namun pada penelitian ini variabel independen yang digunakan sebagai variabel penjelas dalam perhitungan probabilitas kepemilikan rumah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Masrofi; Agung Riyadi, Agus Setiyawan dan Didit Purnomo hanya dilakukan pengidentifikasian pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan, maka dalam penelitian ini dilakukan perhitungan pada potensi retribusi daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yaitu retribusi kebersihan sampah dalam hal ini retribusi kebersihan sampah rumah tangga.

2.2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul	Kesimpulan	Motode yang digunakan
1	Muhamad Musrofi	Potensi dan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah	PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah sedangkan inflasi dan perubahan peraturan tidak signifikan. Pajak pembangunan merupakan pajak potensial sedangkan retribusi pangkalan, retribusi ijin bangunan, retribusi rumah sakit, balai pengobatan dan puskesmas, retribusi parkir dan retribusi sampah dan kebersihan lainnya merupakan retribusi yang potensial untuk dikembangkan di kota Semarang.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode linier berganda yang ditaksir dengan metode <i>ordinary least squer</i> (OLS). $PD = \alpha_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 JP + \beta_3 Inf + \beta_4 D + e$ $RD = \alpha_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 JP + \beta_3 Inf + \beta_4 D + e$ Keterangan : PD = Pajak daerah RD = Retribusi daerah α_0 = Konstanta $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Parameter yang diestimasi PDRB = Produk domestik bruto JP = Jumlah penduduk Inf = Inflasi D = Variabel dummy
2	Agung Riyadi,	Potensi pajak dan	Pada penelitian ini objek penelitian yang	Untuk setiap pajak dan retribusi yang diteliti, penelitian nilai

	Anton Agus Setyawan, dan Didit Purnomo	retribusi daerah di kabupaten Sukoharjo	<p>digunakan adalah pajak dan retribusi yang telah dipungut setelah tahun 2000, yang diteliti sebanyak 6 pajak dan 12 retribusi daerah. Didapatkan suatu hasil bahwa semua pajak di kab.Sukoharjo pada dasarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Pajak dan retribusi yang potensial untuk dikembangkan adalah pajak pendapatan ABT dan APT, retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak penggalian tambang gol.c , pajak reklame, retribusi ijin gangguan, retribusi pelayanan sampah dan kebersihan dan retribusi rumah pemotongan hewan. Berdasarkan penelitian ini, faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah (i) perkembangan demografi seperti jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga (ii) ciri khas daerah dan (iii) perilaku ekonomi dan organisasi aparat pemerintah daerah dalam pelaksanaan</p>	<p>ekonominya melalui variabel <i>yield, equity, economic efficiency, ability to implement, suitability as local source</i>. Untuk variabel <i>yield</i> digunakan pemberian nilai untuk menunjukkan berpotensi atau tidaknya pajak dan retribusi daerah tersebut. Pemberian nilai ini, dilihat berdasarkan rata – rata realisasi penerimaan tahun 1999 – 2000 kab.Sukoharjo dibandingkan dengan kab / kota lain eks kerisidenan Surakarta. <i>Variabel efficiency</i>, didasarkan pada perbandingan antara pajak biaya dan retribusi dengan total cost. <i>Ability to implement</i>, untuk mengukur ini dilakukan dua perbandingan (i) perbandingan antara target dan realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 1999 – 2000 (ii) perbandingan target dan realisasi antara Kab.Sukoharjo dan Kab/ Kota eks karisidenan eks Surakarta. <i>Suitability as a local source</i>, alat analisis yang digunakan adalah</p>
--	--	---	--	--

			pungutan pajak dan retribusi daerah.	berupa perbandingan antara peraturan daerah yang menetapkan suatu pajak dan retribusi daerah sebagai pungutan daerah dengan UU No.18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2007. <i>Ekiuty</i> , dilakukan analisa pada rumah tangga produksi, dimana pada rumah tangga produksi yang didasarkan pada empat komponen pokok yaitu pajak dan retribusi yang dibayarkan, omzet per periode waktu, jumlah tenaga kerja per periode waktu, dan modal per periode waktu.
3	Andika Budi Ratwono	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di provinsi DKI Jakarta.	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di provinsi DKI Jakarta dan menganailisis pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap perkembangan penerimaan retribusi daerah di provinsi DKI Jakrata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan suatu hasil bahwa jumlah penerbitan akta dan catatan	Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. $\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln x_{1i} + \beta_2 \ln x_{2i} + \beta_3 \ln x_{3i} + \beta_4 \ln x_{4i} + \beta_5 \ln x_{5i} + \beta_6 \ln x_{6i} + \beta D_{li} + \mu$ Keterangan, Y_i = penerimaan retribusi dalam (Rupiah)

			<p>sipil; tingkat inflasi; jumlah rumah sakit dan puskesmas; jumlah pendapatan perkapita; dan jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah provinsi DKI Jakarta. Namun, kebijakan otonomi daerah berpengaruh nyata namun berpengaruh negatif dengan penerimaan retribusi daerah. Adapun panjang jalan dan jumlah penduduk tidak berpengaruh nyata dengan penerimaan retribusi daerah.</p> <p>Kebijakan otomoni daerah berpengaruh nyata namun mempunyai hubungan yang negatif dengan penerimaan retribusi daerah.</p>	<p>x_{1i} = panjang jalan (meter) x_{2i} = inflasi (persen) x_{3i} = jumlah rumah sakit dan puskesmas (unit) x_{4i} = jumlah penduduk (jiwa) x_{5i} = jumlah pendapatan perkapita (Rupiah) x_{6i} = jumlah kendaraan bermotor (unit) $D_{1i} = 1$, untuk setelah dikeluarkannya kebijakan otda 0 , untuk sebelum dikeluarkannya kebijakan perda.</p>
4	Edi Mulyadi	Pengaruh pertumbuhan tenaga kerja sektor industri terhadap permintaan perumahan sederhana dan sangat sederhana di kab.Bekasi	<p>Penelitian ini dilakukan di kab.Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak adanya pembentukan wilayah industri terhadap permintaan rumah di Kab.Bekasi. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah jumlah rumah yang diminta, jumlah tenaga kerja industri, harga rata-rata RS dan RSS,</p>	<p>Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier metode kuadrat terkecil biasa (OLS), model yang digunakan dalam penelitian ini adalah $Q_t=f(E_L,P_t,R_e,YP_c)$ dimana Q_t = jumlah rumah yang diminta pada periode t (unit)</p>

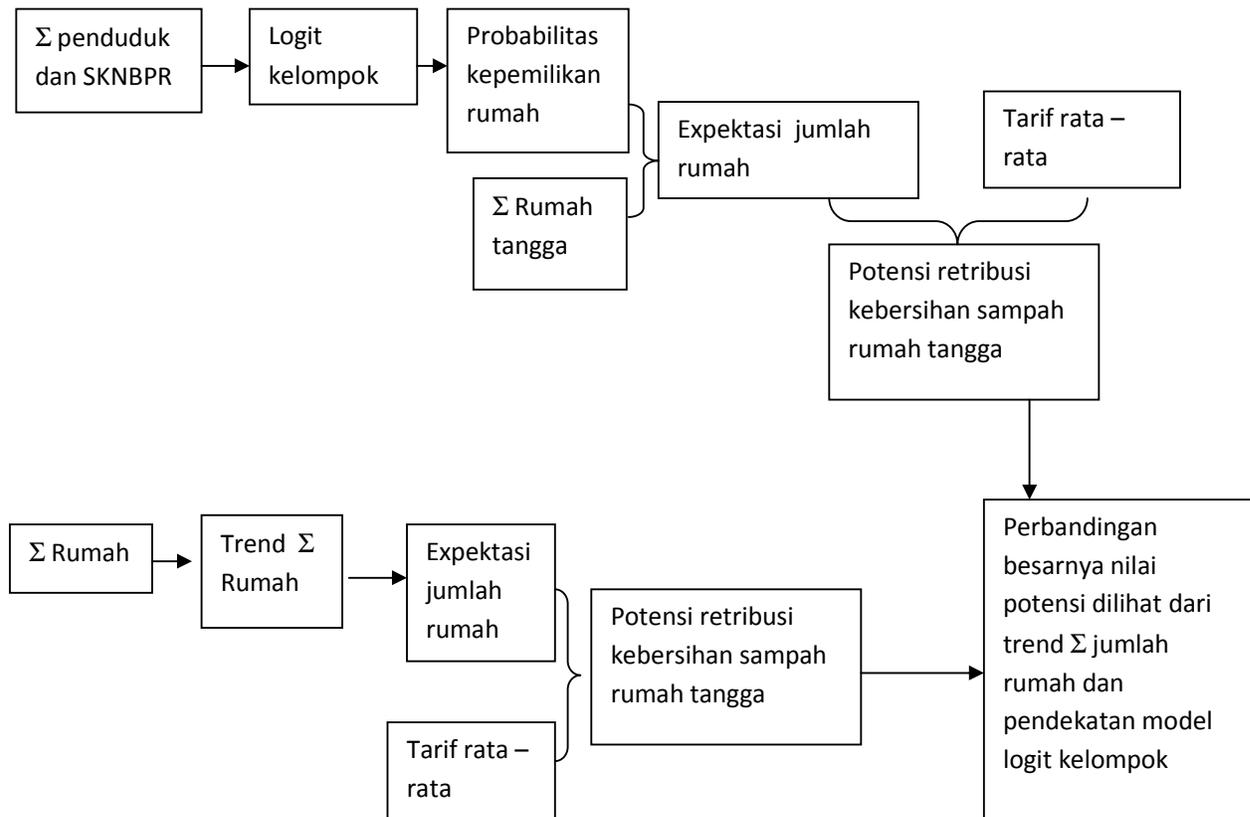
			<p>tingkat suku bunga KPR, dan PDRB perkapita. Pada penelitian ini, jumlah tenaga kerja industri berpengaruh positif terhadap permintaan rumah. Harga rata-rata RS dan RSS serta suku bunga KPR berpengaruh negatif terhadap permintaan rumah RS dan RSS. Sedangkan PBRD perkapita tidak terbukti berpengaruh secara positif.</p>	<p>E_L, jumlah tenaga kerja industri periode t (orang) P_t, harga rata-rata RS dan RSS pada periode t (Rp/unit) R_t, tingkat suku bunga KPR (%/tahun) $Y P_c$, PDRB perkapita periode t</p>
--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, terdapat dua kerangka pemikiran. *Pertama*, perhitungan dengan pendekatan model logit kelompok. Pada model ini yang menjadi variabel dependen adalah rasio probabilitas kepemilikan rumah dengan probabilitas tidak memiliki rumah di 33 Kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah. Dimana rasio probabilitas kepemilikan rumah didapatkan dari perbandingan jumlah rumah dengan jumlah keluarga di 33 Kabupaten / Kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Variabel independen / penjelas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk dan suku bunga kredit. Pada persamaan logit kelompok ini dilakukan regresi. Setelah itu didapatkan probabilitas kepemilikan rumah pada masing – masing 33 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Setelah diketahui besarnya probabilitas, kemudian probabilitas tersebut dikalikan dengan jumlah rumah tangga yang ada sehingga menghasilkan expektasi jumlah rumah. Expektasi jumlah rumah dikalikan dengan tarif rata – rata retribusi kebersihan sampah rumah tangga menghasilkan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dalam satu bulan. Untuk menghitung potensi selama satu tahun, besarnya potensi selama satu bulan dikalikan dengan dua belas bulan. Karena pada penelitian ini studi kasus dilakukan di kota Semarang, maka probabilitas kepemilikan rumah di kota Semarang dikalikan dengan jumlah rumah tangga menghasilkan expektasi jumlah rumah di kota Semarang. Expektasi jumlah rumah dikalikan dengan besarnya terif rata – rata menghasilkan potensi selama satu bulan. Untuk menghitung potensi selama satu tahun maka potensi selama satu bulan dikalikan dengan dua belas bulan.

Kedua, melalui trend jumlah rumah. Pada perhitungan kedua ini potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga pada tahun 2005 – 2008 dihitung dengan cara jumlah rumah riil dikalikan dengan besarnya tarif rata-rata retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Pada tahun 2009 – 2013, data jumlah rumah belum tersedia oleh karena itu dilakukan perhitungan trend jumlah rumah. Setelah didapatkan proyeksi jumlah rumah maka dikalikan dengan tarif rata-rata retribusi kebersihan sampah rumah tangga dalam satu bulan. Untuk potensi selama satu tahun, potensi satu bulan dikalikan dengan dua belas bulan. Setelah didapatkan potensi dari dua pendekatan tersebut maka dilakukan perbandingan potensi berdasarkan dua pendekatan tersebut. Berikut gambar kerangka pikir pada penelitian ini ;

Gambar 2.3
Diagram Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan dalam kerangka pikir dapat diketahui bahwa dalam perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dilakukan dua pendekatan yaitu dengan model logit dan trend jumlah rumah. Model logit kelompok digunakan untuk menghitung probabilitas suatu rumah tangga dalam memiliki rumah. Dalam perhitungan probabilitas tersebut terdapat variabel independen / variabel penjelasnya yaitu jumlah penduduk dan suku bunga kredit. Oleh karena itu diperlukan pengujian hipotesis pada kedua variabel independen tersebut. Berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah ;

1. Jumlah penduduk mempengaruhi permintaan rumah
2. Suku bunga kredit mempengaruhi permintaan rumah

Bab III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas kepemilikan rumah di 33 Kabupaten / kota yang ada di provinsi Jawa Tengah; perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga di kota Semarang. Untuk penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional dalam penelitian ini akan di jelaskan secara rinci pada sub bab berikut:

3.1.1 Probabilitas Kepemilikan Rumah di 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah

Pengertian probabilitas adalah peluang. Dalam penelitian ini pengertian probabilitas kepemilikan rumah adalah peluang suatu rumah tangga dalam memiliki rumah. Probabilitas kepemilikan rumah merupakan besarnya probabilitas rumah tangga di 33 kabupaten / kota di Jawa Tengah dalam memiliki rumah. Adapun variabel dependen dalam persamaan ini adalah perbandingan jumlah rumah yang ada di 33 kabupaten / kota di Jawa Tengah dengan jumlah rumah tangga yang ada di 33 kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk di 33 kabupaten / kota di Jawa Tengah dan suku bunga kredit .

Untuk menghitung probabilitas kepemilikan rumah ini, digunakan metode logit kelompok, dimana yang menjadi variabel dependen adalah rasio antara probabilitas untuk kepemilikan rumah di 33 kabupaten / kota (p) dengan probabilitas tidak memiliki rumah ($1-p$) kemudian diambil “natural log” $\ln(p / 1-p)$, dimana $\ln(p/1-p) = L_i$ atau biasa disebut dengan logit. Sebagai variabel penjelas atau variabel independen yaitu jumlah penduduk dan suku bunga kredit.

Pada penelitian ini, perhitungan probabilitas kepemilikan rumah dengan menggunakan model logit kelompok digunakan untuk mengestimasi jumlah rumah. Perhitungan probabilitas kepemilikan rumah dengan menggunakan model logit kelompok dilakukan di 33 kabupaten / kota di Jawa Tengah dikarenakan adanya keterbatasan data pada kota Surakarta dan kota Tegal. Dari persamaan yang didapatkan dari model logit kelompok dapat dihitung probabilitas kepemilikan rumah di 33 kabupaten / kota yang ada di provinsi Jawa Tengah termasuk didalamnya perhitungan probabilitas kepemilikan rumah di kota Semarang.

Rumah tangga menurut Badan Pusat Statistik adalah seseorang atau sekelompok yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Satu dapur maksudnya adalah bahwa pembiayaan keperluan sehari – hari dikelola bersama – sama. Di provinsi Jawa Tengah, dalam setiap rumah tangga terdapat 3,8 orang. Di kota Semarang, dalam setiap rumah tangga terdapat 3,8 orang.

Suku bunga kredit. Besarnya suku bunga kredit rumah dalam penelitian ini diproksi dari suku bunga nominal kredit konsumsi bank perseroan. Satuan dalam suku bunga ini adalah persen (%).

3.1.2 Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga di Kota Semarang

Pengertian potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga adalah besarnya jumlah rumah yang ada di kota Semarang dikalikan dengan besarnya tarif rata – rata retribusi kebersihan sampah rumah tangga.

Pada tahun 2005 – 2008 dalam perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga, jumlah rumah yang digunakan adalah jumlah rumah riil. Untuk menghitung potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga digunakan rumus sebagai berikut ;

“ Σ rumah di kota Semarang \times besarnya tarif rata – rata retribusi kebersihan sampah rumah tangga”

Untuk tahun 2009 sampai 2013, data jumlah rumah belum tersedia oleh karena itu digunakan dua metode untuk menaksir kepemilikan rumah. Setelah didapatkan expektasi jumlah rumah maka dapat dilakukan perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Berikut penjelasannya,

- a) Menggunakan Trend Jumlah Rumah ;

Pada tahun 2009 sampai 2013 besarnya rumah belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu dilakukan perhitungan proyeksi jumlah rumah dengan menggunakan metode trend linier. Setelah didapatkan ekspektasi jumlah rumah, maka rumus yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga adalah “ **ekspektasi Σ rumah \times tarif rata – rata retribusi kebersihan sampah rumah tangga**”.

- b) Menggunakan pendekatan model logit kelompok ;

Melalui model logit kelompok, dapat diketahui masing - masing besar probabilitas kepemilikan rumah yang ada di 33 kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah. Melalui model logit kelompok dapat diketahui besarnya probabilitas kepemilikan rumah yang ada di kota Semarang. Setelah didapatkan probabilitas kepemilikan rumah, maka probabilitas kepemilikan rumah dikalikan dengan jumlah rumah tangga yang ada di kota Semarang. Dari perkalian probabilitas kepemilikan rumah dengan jumlah rumah tangga maka, didapatkan ekspektasi jumlah rumah di kota Semarang. Untuk menghitung potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga digunakan rumus sebagai berikut ; **Expektasi Σ rumah \times besarnya tarif rata – rata retribusi kebersihan sampah rumah tangga.**

Indikator dari perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga adalah tarif retribusi kebersihan sampah rumah tangga dan jumlah rumah yang ada di kota Semarang.

Pengertian tarif adalah nilai jasa suatu pelayanan kebersihan sampah dengan sejumlah uang yang berdasarkan nilai tersebut penyedia jasa pelayanan kebersihan sampah bersedia memberikan jasa pelayanannya. Pada penelitian ini, tarif retribusi kebersihan sampah rumah tangga yang digunakan adalah tarif rata – rata. Besarnya tarif rata – rata didapatkan dari menjumlahkan besarnya tarif dari persil rumah tangga yang terletak di jalan kelas I dan II sebesar Rp 5.000; persil rumah tangga yang terletak di jalan kelas III dan IV sebesar Rp 3.000; dan persil rumah tangga yang terletak di jalan kelas V dan VI sebesar Rp 1.000 kemudian dibagi dengan jumlah klasifikasi persil jumlah rumah tangga, sehingga didapatkan angka Rp 3.000.

3.2 Populasi

Populasi menurut Suharsimi (1998:115) (dalam Diah Ristrama;2009 : 42) adalah keseluruhan obyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Pada penelitian ini perhitungan probabilitas kepemilikan rumah berdasarkan kemungkinan rumah tangga di provinsi Jawa Tengah memiliki rumah. Pada perhitungan probabilitas kepemilikan rumah masing – masing kabupaten / kota memiliki probabilitas yang berbeda. Probabilitas kepemilikan

rumah di 33 kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah berbeda, namun untuk kota Semarang nilai probabilitas kepemilikan rumah hampir sama dengan kabupaten / kota yang lainnya. Hal ini dikarenakan pola perilaku dalam permintaan rumah pada masing – masing kabupaten / kota hampir sama. Untuk menghitung probabilitas kepemilikan rumah di 33 kabupaten / kota menggunakan data *cross section*. Dengan adanya probabilitas ini, dapat dilakukan penaksiran besarnya potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Pada penelitian ini, studi kasusnya dilaksanakan di kota Semarang sehingga dalam penelitian ini tidak ada sampel yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah probabilitas kepemilikan rumah yang ada di 33 kabupaten / kota yang ada di provinsi Jawa Tengah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah, perpustakaan Bank Indonesia yang ada di kota Semarang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang. Adapun rincian sumber data sebagai berikut ;

- a) Jumlah penduduk, jumlah rumah, dan jumlah rumah tangga di 33 kabupaten / kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2007 berasal dari BPS provinsi Jawa Tengah.

- b) Jumlah penduduk, dan jumlah rumah yang ada di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 – 2008 didapatkan dari BPS provinsi Jawa Tengah.
- c) Besarnya tarif retribusi kebersihan sampah atas dasar objek retribusi kebersihan sampah rumah tangga yang didapatkan dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- d) Besarnya suku bunga nominal kredit konsumsi bank perseroan pada tahun 2007 yang didapatkan dari perpustakaan Bank Indonesia.
- e) Data jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan jumlah rumah di kota Semarang pada tahun 1995 – 2008 didapatkan dari BPS Jawa Tengah.
- f) Data target dan realisasi retribusi pelayanan persampahan / kebersihan tahun 2007 – 2010; data target retribusi pelayanan persampahan / kebersihan tahun 2011; data realisasi pendapatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010; dan data penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga tahun 2010; data besarnya biaya belanja langsung dan tak langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang tahun 2010 didapatkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah mencari data

mengenai hal – hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya (Moeleong,2000:236).

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mencari data kuantitatif seperti target dan realisasi retribusi pelayanan persampahan / kebersihan kota Semarang tahun 2007 - 2010, data target retribusi pelayanan persampahan / kebersihan tahun 2011, data realisasi pendapatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, data penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga tahun 2010, data besarnya biaya belanja langsung dan tak langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang tahun 2010, jumlah penduduk, jumlah rumah, jumlah rumah tangga, dan besarnya suku bunga kredit.

Metode Wawancara, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah, dan tata cara pemungutan retribusi kebersihan sampah di kota Semarang. Wawancara ini dilakukan dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang.

3.5 Metode Analisis

3.5.1. Analisis Kualitatif

3.5.1.1 Perhitungan Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga

Menurut Dika Ristama (49: 2009) potensi adalah “*suatu nilai maksimal yang dapat diharapkan menjadi tolak ukur penetapan retribusi daerah dalam suatu kurun waktu tertentu*”. Potensi mempunyai sifat relatif tetap dan merupakan

perhitungan perkiraan yang didasarkan pada data. Perhitungan potensi ini dilakukan untuk menghitung nilai potensi yang ada pada retribusi kebersihan sampah rumah tangga di kota Semarang. Adapun rumus analisis potensi menurut Harmolie Harun (17:2003) menggunakan perasamaan sebagai berikut ;

$$P_tKS = \text{Tarif Retribusi Kebersihan Sampah} \times \Sigma \text{Rumah} \quad (1)$$

Dimana P_tKS adalah potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga.

3.5.1.2 Trend dengan Metode *Ordinary Least Square*

Persamaan yang digunakan dalam garis trend linier adalah $Y' = a + bX$, dimana Y' adalah data berkala, X adalah waktu, a dan b adalah bilangan konstanta. Apabila nilai a dan b sudah diketahui maka garis trend dapat digunakan untuk meramalkan besarnya nilai Y . Model trend yang baik adalah nilai Y' tidak jauh berbeda dengan data aslinya (Y). Pada persamaan trend ini besarnya nilai b dapat dihitung dengan cara $b = \Sigma X.Y / \Sigma X^2$ dan nilai a dapat dihitung dengan cara $a = \text{rata - rata nilai } y$. Metode perhitungan trend digunakan untuk memproyeksi jumlah rumah dan jumlah rumah tangga yang ada di kota Semarang pada tahun 2009 – 2013.

3.5.2 Analisis Kuantitatif

3.5.2.1 Estimasi Model Logit Kelompok

Estimasi model ini dilakukan untuk mengetahui besarnya probabilitas rumah tangga dalam memiliki rumah (P_i). Variabel yang digunakan untuk mencari

probabilitas penduduk mempunyai rumah adalah jumlah rumah tangga (X_a), jumlah rumah yang ada di 33 kabupaten / kota yang ada di provinsi Jawa Tengah (X_b). P_i merupakan probabilitas rumah tangga untuk memiliki rumah, ($1 - P_i$) merupakan probabilitas rumah tangga yang tidak memiliki rumah. Dengan demikian ditulis sebagai berikut :

$$P_i / (1 - P_i) = (1 + e^{z_i}) / (1 + e^{-z_i}) = e^{z_i} \quad (2)$$

dimana $P_i / (1 - P_i) = e^{z_i}$ merupakan *odds ratio*, yaitu rasio antara probabilitas untuk memiliki rumah dengan probabilitas untuk tidak memiliki rumah. Jika pada persamaan diatas dinaturalkan lognya, yaitu $\ln = \log$ dengan bilangan pokok e, maka didapatkan suatu fungsi sebagai berikut,

$$L_i = \ln (P_i / (1 - P_i)) = Z_i = A + B_{JP} + B_{SKNBPR} \quad (3)$$

L_i merupakan logit sehingga persamaan diatas merupakan logit model. L_i tidak hanya linier terhadap variabel JP, dan SKNBPR, tetapi linier terhadap parameter B (J.Supranto : 317). Pada persamaan 3 JP adalah jumlah penduduk dan SKNBPR adalah suku bunga nominal kredit konsumsi bank perseroan.

Berdasarkan variabel di atas (variabel x_a dan x_b), didapatkan bahwa $\hat{P}_i = X_b / X_a$, dimana \hat{P}_i merupakan frekuensi relatif yang dapat digunakan sebagai suatu estimasi, P_i merupakan probabilitas rumah tangga yang ada di setiap kabupaten / kota yang mempunyai rumah. Dengan menggunakan \hat{P}_i persamaan

$$L_i = \ln (P_i / (1 - P_i)) = Z_i = A + B_{JP} + B_{SKNBPR}$$

dapat dilakukan estimasi logit kelompok sebagai berikut,

$$\hat{L}_i = \ln (\hat{P}_i / (1 - \hat{P}_i)) = \hat{A} + \hat{B}_{JP} + \hat{B}_{SKNBPR} \quad (4)$$

Dalam menyelesaikan persamaan tersebut, dapat diterapkan cara OLS. Namun pada persamaan tersebut, kesalahan pengganggu harus mengikuti fungsi normal yang akan mendekati normal. Kesalahan pengganggu dalam logit ini *heteroskedastik*. Sehingga pada persamaan tersebut tidak menggunakan OLS namun menggunakan *weighted least squares* (WLS) yaitu least square yang ditimbang. P_i dapat diganti dengan \hat{P}_i . Oleh karena itu untuk setiap JP dan SKNBPR dapat dihitung perkiraan logit $L_i = \ln(\hat{P}_i / (1 - \hat{P}_i))$. Sehingga untuk mengatasi masalah *heteroskedastik*, persamaan 3 dapat diubah menjadi persamaan yang telah ditimbang, sehingga persamaan diatas menjadi persamaan di bawah ini (J.Supranto : 320),

$$\sqrt{w_i} L_i = A \sqrt{w_i} + B \sqrt{w_i} JP + B \sqrt{w_i} SKNBPR \quad (5)$$

atau bisa ditulis sebagai berikut

$$L_i^* = A \sqrt{W_i} + B_{JP}^* + B_{SKNBPR}^* + v_i \quad (6)$$

Keterangan :

L_i = rasio antara probabilitas untuk memiliki rumah dengan probabilitas untuk tidak memiliki rumah

L_i^* = L_i yang ditimbang = rasio antara probabilitas untuk memiliki rumah dengan probabilitas untuk tidak memiliki rumah yang telah ditimbang

W_i = JK (jumlah rumah tangga) $\hat{P}_i (1 - \hat{P}_i)$ = timbangan

JP^* , $SKNBPR^*$ = variabel penjelas yang ditimbang, dan

JP^* = Jumlah penduduk yang ada di 33 kabupaten /
kota yang ada di provinsi Jawa Tengah yang telah ditimbang
 $SKNBPR^*$ = Suku bunga nominal kredit konsumsi bank
perseroan yang telah ditimbang

$v_i = \varepsilon_i$ yang ditimbang

Analisis model logit kelompok ini digunakan untuk mengetahui besarnya probabilitas kepemilikan rumah oleh rumah tangga yang ada di 33 kabupaten / kota yang ada di provinsi Jawa Tengah, kota Semarang termasuk didalamnya. Nilai probabilitas ini digunakan untuk menghitung ekspektasi jumlah rumah yang ada di 33 kabupaten / kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Studi kasus dalam penelitian ini di kota Semarang maka perhitungan ekspektasi jumlah rumah dilakukan dengan cara mengkalikan besarnya probabilitas kepemilikan rumah di kota Semarang dengan jumlah rumah tangga yang ada di kota Semarang.

3.5.2.2 Pendeteksian Asumsi Klasik

Pada persamaan regresi linear klasik, suatu model yang digunakan untuk membuat estimasi atau perkiraan harus bersifat BLUE. Untuk mengetahui apakah persamaan tersebut bersifat BLUE maka dilakukan pendeteksian asumsi klasik. Pada pendeteksian asumsi klasik, jika model yang digunakan tidak terdeteksi mengandung asumsi klasik maka model tersebut dapat dikatakan bersifat BLUE dan model tersebut baik untuk digunakan suatu estimasi. Adapun pendeteksian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah ;

3.5.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu mempunyai distribusi yang normal (Imam Ghozali,2009;107). Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov – Smirnov (KS). Jika besarnya nilai kolmogorov signifikan pada suatu tingkatan tertentu (5%) maka residual tidak terdistribusi secara normal.

3.5.2.2.2 Uji Moltikolinearitas

Multikolinearitas adalah adalah suatu penyakit dalam suatu model dimana antar variabel independen terdapat suatu hubungan yang sempurna. Dengan adanya multikolinearitas ini, menyebabkan estimastimator bersifat BLUE namun masih memiliki varian dan kovarian yang besar sehingga sulit dipakai sebagai alat estimasi, standard dari koefisien regresi besar sehingga menyebabkan interval keyakinan untuk parameter dari populasi juga cenderung melebar. Adapun ciri – ciri dari adanya multikolinearitas adalah :

1. R^2 tinggi namun variabel independen banyak yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.
2. Melalui uji F, dimana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka pada tingkat signifikansi tertentu variabel independen berkorelasi terhadap variabel lainnya.
3. Kolinearitas dapat diduga kalau R^2 cukup tinggi (antara 0,7 – 1,0) dan jika koefisien korelasi sederhana juga tinggi.

4. Mengetahui adanya multikolinearitas dapat diidentifikasi dengan cara menghitung koefisien korelasi antar variabel independen.
5. Dengan melihat nilai VIF, jika nilai VIF pada variabel independen < 10 maka antar variabel independen yang digunakan dapat diduga tidak mengandung multikolinearitas. Jika nilai VIF > 10 maka antar variabel independen yang digunakan dapat diduga mengandung multikolinearitas.

3.5.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu penyakit dalam suatu model dimana pola penyebaran varian variabel independen tidak sama. Heteroskedastisitas ini biasanya terjadi pada data yang bersifat *cross section*. Akibat adanya heteroskedastisitas adalah OLS tetap tidak bias dan konsisten namun tidak lagi efisien baik untuk sampel kecil maupun untuk sampel besar, perhitungan standart error tidak dapat dipercaya karena variannya tidak minimum.

Ada beberapa cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, digunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji Glejser ini, dilakukan dengan mengabsolutkan besarnya kesalahan pengganggu. Setelah mendapatkan residual dari regresi OLS, dilakukan pengabsolutan pada kesalahan pengganggu terhadap variabel bebas yang dianggap mempunyai hubungan yang kuat dengan σ_i (J.Supranto, 2010;59).

Cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas menurut wing wahyu (5.24: 2009) adalah dengan cara (i) metode WLS , metode

ini dapat dilakukan jika σ_i^2 diketahui, (ii) melalui metode White , metode ini dilakukan jika σ_i^2 tidak diketahui, dan (iii) Metode transformasi. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data *cross section*, dimana pada data *cross section* ini rawan akan penyakit heteroskedastisitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk menghindari penyakit heteroskedastisitas digunakan metode *weighted least squares* (WLS).

3.5.2.2.4 Uji Autokorelasi

Merupakan suatu penyakit dimana terdapat korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (J.Supranto, 82: 2010). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1.

Adapun cara mendeteksi autokorelasi dengan cara (i) uji Durbin Watson (ii) uji lagrange multiplier (iii) uji breusch – godfy (iv) uji statistik Q ; box – pierce dan ljung box dan (v) run test. Pada penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan run test. Run test ini, digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika berdasarkan hasil run tes ternyata didapatkan bahwa besarnya nilai residual signifikan pada taraf signifikansi tertentu, maka dapat dikatakan residualnya tidak random dan dapat disimpulkan adanya autokorelasi antar nilai residual (Imam Gozhali,2009;87-89).

3.5.2.3 Uji Signifikansi

3.5.2.3.1 Uji F

Adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang dikembangkan mampu menjelaskan secara signifikan dari variabel dependen yang digunakan. Pengambilan keputusan pada uji F yaitu :

1. $F_{hit} > F_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti model persamaan regresi yang dikembangkan mampu menjelaskan secara signifikan dari dependen variabel yang digunakan, serta variabel independen yang digunakan secara bersama – sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.
2. $F_{hit} < F_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti model persamaan regresi yang dikembangkan tidak mampu menjelaskan secara signifikan dari dependen variabel yang digunakan dan variabel independen yang digunakan secara bersama – sama tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.

Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%.

2.5.2.3.2 Uji t

Uji t pada penelitian ini dilakukan dengan melihat besarnya probabilitas t value. Probabilitas t value digunakan untuk mengidentifikasi apakah masing – masing variabel independen yang digunakan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen yang dimaksud adalah jumlah penduduk (JP) dan variabel independen suku bunga nominal kredit

konsumsi bank perseroan (SKNBPR). Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila probabilitas t_{hitung} variabel independen kurang dari taraf signifikansi yang digunakan (5%) maka variabel independen tersebut dapat diidentifikasi berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.